



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar hukum tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundangan lainnya yang diperlukan; gambaran umum daerah yang terdiri dari kondisi geografis daerah, gambaran umum demografis, dan kondisi ekonomi yang terdiri dari potensi unggulan daerah dan pertumbuhan ekonomi/PDRB.

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sistem daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan Kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Hak dan kewajiban tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan kepada publik melalui instrument sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 yang menyatakan selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 27 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, yang

LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2013



tercantum dalam pasal 17 ayat (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2013 ini merupakan laporan pertanggungjawaban tahun ketiga Kepala Daerah periode pertama dalam RPJMD 2011-2016. Sesuai dengan pasal 27 ayat (4) laporan ini digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2013, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 disusun untuk :

1. Memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Memberikan gambaran sejauh mana perencanaan program dapat dilaksanakan, tingkat capaian keberhasilan serta manfaatnya.
3. Sebagai evaluasi atas kinerja Bupati selama menjalankan tugas jabatan periode tahun 2013.

D. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km² dan menempati urutan kelima diantara Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Jambi atau seluas $\pm 10,2$ persen dari luas wilayah Propinsi Jambi.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67%). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km² yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km² dan lautan/perairan seluas 3.560 Km². Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara atau antara 103°23'-104°31' Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan,



disebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.445 km² dan luas perairan (laut) ± 3.560,09 km² yang terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan	
				Km ²	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478,17	8,78
5.	Muara Sabak Barat	7	0	410,28	7,53
6.	Muara Sabak Timur	2	10	251,75	4,62
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
	JUMLAH	20	73	5.445,00	100,00

Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2013

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/ kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di dataran yang sangat bervariasi mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa / gambut dengan ketinggian antara 0 - 20 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah / gambut ini biasanya ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut.



Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 8 - 10 bulan basah dan 2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 68-106 mm. Suhu udara rata-rata 22,90 C – 31,40 C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 bertambah sebanyak 1.396 jiwa dari 211.522 jiwa pada tahun 2012 menjadi 212.918 jiwa pada tahun 2013 atau dengan pertumbuhan 0,66 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2013 sebesar 39,10 jiwa/km² dan sex ratio 105.

Dari data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Sedangkan jumlah rumah tangga tertinggi juga berada di kecamatan Muara Sabak Timur dan terendah pada kecamatan Berbak.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 dan 2013

No	Kecamatan	2012					2013*				
		Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laki-laki	Perempuan	Σ Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Muara Sabak Timur	15.939	15.749	31.688	101	77,24	16.044	15.853	31.897	101	77,74



2	Muara Sabak Barat	8.167	7.843	16.010	104	63,59	8.221	7.895	16.116	104	64,01
3	Kuala Jambi	7.283	7.079	14.362	103	119,17	7.331	7.126	14.457	103	119,95
4	Mendahara	13.334	12.785	26.119	104	28,67	13.422	12.869	26.291	104	28,86
5	Mendahara Ulu	7.920	7.099	15.019	112	111,57	7.972	7.146	15.118	112	39,65
6	Geragai	11.469	10.221	21.690	112	112,21	11.545	10.288	21.833	104	76,51
7	Dendang	7.778	7.491	15.269	104	103,83	7.829	7.540	15.370	102	32,14
8	Nipah Panjang	13.145	12.847	25.992	102	102,32	13.232	12.932	26.164	105	111,48
9	Rantau Rasau	11.734	11.180	22.914	105	104,96	11.811	11.254	23.065	105	64,77
10	Berbak	5.146	4.903	10.049	105	104,96	5.180	4.935	10.115	105	52,02
11	Sadu	6.386	6.024	12.410	106	106,01	6.428	6.064	12.492	106	6,86
Jumlah		108.301	103.221	211.522	105	104,92	109.016	103.902	212.918	105	39,10

*) Angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.

Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap digunakan dan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan totalitas nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan setelah dikurangi biaya produksinya dari berbagai unit usaha di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan Katalog BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1403.1506, unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) sektor : (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan penggalan, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas, dan air bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, hotel, dan restoran, (7) Pengangkutan dan komunikasi, (8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) Jasa-jasa. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (*current price*) maupun berdasarkan harga konstan (*constant price*).

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan. Mengingat PDRB atas dasar harga berlaku mengandung unsur inflasi makro, maka tinggi rendahnya pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh tingkat inflasi



dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB atas dasar harga berlaku belum dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil Tanjung Jabung Timur. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil, dapat digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 atas harga konstan meningkat dari tahun 2012 yaitu dari IDR 2.758.000,44 menjadi IDR 2.936.131,13. Peningkatan ini merupakan indikasi dari membaiknya perekonomian kabupaten ini.

Tabel 1.3
PDRB (dalam jutaan) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Timur (%)
Tahun 2012 – 2013 (Harga Konstan)

No.	Sektor	2012		2013*	
		PDRB	Laju Pertumb	PDRB	Laju Pertumb
1.	Pertanian	742.721,30	4,34	770.319,59	3,72
2.	Pertambangan dan penggalian	1.076.565,73	11,14	1.179.247,24	9,54
3.	Industri pengolahan	253.945,07	3,53	261.620,12	3,02
4.	Listrik, gas, dan air bersih	3.472,22	8,60	3.727,89	7,36
5.	Bangunan	36.933,39	6,52	38.995,13	5,58
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	417.230,41	8,70	448.309,03	7,45
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	100.609,22	3,70	103.796,40	3,17
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	35.245,20	4,68	36.657,45	4,01
9.	Jasa-jasa	91.277,90	2,79	93.458,30	2,39
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.758.000,44	7,44	2.936.131,13	6,37

* angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah

Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 terutama didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh sektor perdagangan-hotel dan restoran, industri pengolahan, jasa-jasa, pengangkutan – komunikasi, konstruksi – bangunan, keuangan – persewaan – jasa perusahaan, serta listrik – gas dan air bersih.

Untuk lebih jelasnya dapat diikuti pada tabel 1.4. berikut:

Tabel 1.4
Struktur Ekonomi Tanjung Jabung Timur (%) Atas Harga Konstan Tahun 2012-2013

No.	Sektor	2012	2013*
1.	Pertanian	26,93	26,24
2.	Pertambangan dan penggalian	39,03	40,16



3.	Industri pengolahan	9,21	8,91
4.	Listrik, gas, dan air bersih	0,13	0,13
5.	Bangunan	1,34	1,33
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	15,13	15,27
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,65	3,54
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	1,28	1,25
9.	Jasa-jasa	3,31	3,18

*angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah

Tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Perkembangan tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata per penduduk.

Bila diamati pola perubahannya, peningkatan pendapatan per kapita nominal ternyata lebih berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat harga umum atau inflasi, tetapi laju kenaikan pendapatan per kapita riil meningkat secara konsisten. Peningkatan pendapatan per kapita riil menunjukkan dua hal yaitu: (1) peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang melebihi kenaikan tingkat harga umum dan (2) peningkatan pendapatan riil yang melebihi kenaikan jumlah penduduk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang berswasembada pangan sehingga potensi gejolak kenaikan tingkat harga umum yang bersumber dari volatilitas harga komoditas pangan relatif kecil. Fakta menunjukkan tingkat harga komoditas bahan makanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat harganya di daerah lain khususnya dalam kawasan Provinsi Jambi.

Tabel 1.5

PDRB Per Kapita Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2013

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR		
TAHUN	PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN	PERTUMBUHAN
2011	12.199.351,00	-
2012	13.067.562,05	7,12
2013*	13.789.962,00	5,53

*angka sementara

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur, data diolah

Peningkatan pendapatan per kapita riil menunjukkan bahwa telah terjadi upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2013 nilai pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 13.789.962,00 per tahun atau Rp 1.149.163,50 per bulan. Angka ini jauh diatas garis batas kemiskinan tahun 2013



menurut Badan Pusat Statistik yaitu sebesar Rp 259.250,00 perkapita per bulan. Bila hingga saat ini masih ditemui angka kemiskinan yang besar berarti lebih mencerminkan adanya ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi.